



| | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|--|
| Media Title | Investor Daily | | |
| Head Line | Akses Tol ke Cilamaya Ditaksir Butuh Rp 1,5 Triliun | | |
| Date | 30 Des 2013 | Color | |
| Section | News | Circulation | |
| Page No | 6 | Article Size | |
| Journalist | Eko Adityo Nugroho | Advalue | |
| Frequency | Daily | PR Value | |

Akses Tol ke Cilamaya Ditaksir Butuh Rp 1,5 Triliun

JAKARTA – Pemerintah memperkirakan kebutuhan pendanaan konstruksi akses jalan bebas hambatan untuk mendukung pengoperasian Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, mencapai Rp 1,5 triliun. Dana itu masih di luar biaya pembebasan lahan maupun kemungkinan terjadinya eskalasi harga material.

“Saat ini biaya pembangunan jalan tol sekitar Rp 50 miliar per kilometer. Jadi, bisa dihitung berapa kebutuhan dananya. Tapi, pelabuhan itu kan baru dibangun 2022, dan biayanya masih bisa lebih tinggi lagi,” tutur Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Akses jalan tol yang menuju Pelabuhan Cilamaya tersebut, terang dia, belum masuk dalam jaringan jalan tol maupun jalan nasional yang ditetapkan pemerintah. Namun begitu, rencana jalan akses ini akan terhubung dengan jalan tol Jakarta-Cikampek.

Untuk membangun jalan tol tersebut perlu dilakukan studi kelayakan oleh pemrakarsa proyek tersebut maupun pemerintah. Studi kelayakan itu diharuskan memerhatikan aturan

tata ruang maupun kondisi lahan persawahan produktif di wilayah tersebut. Pendanaan studi kelayakan infrastruktur ini bisa diperoleh dari pemrakarsa maupun dukungan pemerintah.

“Namun, rencana ini masih kami evaluasi, karena menggunakan lahan abadi pertanian dan ada jaringan irigasi. Karena itu, kami pikir perlu mendapatkan izin dari Menteri Pertanian,” ungkap Djoko Murjanto.

Dia menerangkan, jalan akses tol ini nantinya bisa dibangun oleh pemerintah, seperti akses tol Tanjung Priok yang kini tengah dikonstruksi. Selain itu, bisa pula melelang proyek ini kepada investor yang berminat. “Penggunaan gabungan kerja sama antara pemerintah dan swasta juga bisa,” tutur dia.

Kendati demikian, lanjut Djoko Murjanto, pengerjaan infrastruktur ini tidak bisa dilakukan menyusul pembangunan Pelabuhan Cilamaya juga belum dilakukan. Pelabuhan itu sendiri direncanakan baru dibangun pada 2022 jika tidak ada halangan.

“Kami akan bangun tol ini mendekati penyelesaian pembangunan pe-

labuhan. Paling tidak butuh dua tahun untuk bangun jalan tol itu. Kalau jalannya dibangun terlebih dahulu, akan mubazir karena tidak digunakan. Pertanggungjawaban anggarannya juga akan dipertanyakan,” jelas dia.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, hingga saat ini jalan akses ke Pelabuhan Cilamaya masih dikaji oleh pemerintah, lantaran proyek itu akan memakan lahan pertanian kelas satu yang ada di sekitar Karawang. “Padahal Karawang menurut peraturan tata ruang harus digunakan untuk lahan pertanian,” ujar dia.

Menurut Menteri PU, pemerintah Jepang meminta akses itu dibangun, karena banyak perusahaan asal Negeri Matahari Terbit berada di kawasan industri di Karawang dan Cikarang. Selain itu, akses tol itu juga untuk dukung pengoperasian Pelabuhan Cilamaya yang dapat memecahkan kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Mungkin itu, sejauh ini dibangun di timur supaya trafiknya pecah, sehingga sebagian lari ke timur. Kalau semua menumpuk di Priok, sudah cukup padat,” papar dia. (ean)